

SKRIPSI

**PENERAPAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KELAS II
LUBUK SIKAPING MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2016**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

M. ARIF ALWI SALAM

1210112232

Program Kekhususan : Hukum Perdata (PK I)



Pembimbing :

Misnar Syam, S.H., M.H

Linda elmis, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

PEERAPAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KELAS II LUBUK SIKAPING MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2016

**(M. Arif Alwi Salam, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2019, PK
I, 69 halaman)**

ABSTRAK

Mediasi merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa di Pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata dan sesuai pula dengan Pasal 130 HIR dan 154 RBG. Untuk menyempurnakan pengaturan mengenai mediasi di Pengadilan maka Mahkamah Agung mengeluarkan Pengaturannya, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan adanya Pengaturan tersebut Mahkamah Agung mengharapkan tingkat keberhasilan mediasi di tingkat pertama dapat meningkat sehingga mengurangi jumlah penumpukan perkara di tingkat Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebagai salah satu Pengadilan Negeri tingkat pertama yang telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dalam kenyataannya masih belum dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini dapat dilihat dari terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi hanya sebanyak Tiga perkara saja yang berhasil melalui proses Mediasi yaitu perkara nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lbs, 11/Pdt.G/2017/PN Lbs, 2/Pdt.G/2018/PN.Lbs dan selebihnya gagal. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas II Lubuk Sikaping dengan rumusan masalahnya yaitu : 1. Apakah penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping kelas II sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, 2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Kelas II B Lubuk Sikaping. Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah melalui pendekatan yang bersifat yuridis empiris, dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan datanya yaitu studi dokumen dan penelitian lapangan melalui wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Kelas II Lubuk Sikaping sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sedangkan kendalanya dapat dilihat dari faktor non teknis yaitu ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya mediasi dan ada pula faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi yaitu adanya itikad baik dari para pihak yang kemudian di dukung oleh sumber daya manusia atau hakim yang cakap sebagai mediator.